



Pengembangan Kapasitas Individu dalam Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo

Jesika Mohamad^{1*}, Yacob Noho Nani², Rustam Tohopi³

¹⁻³Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: jesika.mohamad1505@gmail.com¹, yacobnani@ung.ac.id², rustam@ung.ac.id³

*Penulis Korespondensi: jesika.mohamad1505@gmail.com

Abstract. *The study was motivated by the high risk of flooding in Gorontalo City, which requires personnel with sufficient capacity to ensure effective disaster mitigation. The analysis was based on the individual capacity dimensions proposed by the United Nations Development Programme (UNDP): knowledge, skills, experience, service ethics, and leadership capacity. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observations, interviews, and documentation, and were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. Data validity was established through triangulation techniques. The findings indicate that the individual capacity development of BPBD personnel in Gorontalo City has been implemented fairly well across the United Nations Development Programme (UNDP) dimensions of knowledge, skills, experience, service ethics, and leadership capacity. Capacity development has been carried out through education and training, disaster simulation exercises, knowledge sharing, direct involvement in disaster response activities, and collaboration with various stakeholders. Nevertheless, several challenges remain, including unequal access to training opportunities, the need for continuous improvement of technical skills, and the need to strengthen communication and leadership in disaster mitigation efforts. Therefore, sustainable capacity development is necessary to ensure that disaster mitigation is implemented more effectively, professionally, and responsibly to the community's needs.*

Keywords: BPBD; Disaster Mitigation; Individual Capacity Development; Public Administration; UNDP.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan kapasitas individu aparatur dalam mitigasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo. Penelitian dilatarbelakangi oleh tingginya potensi bencana banjir di Kota Gorontalo yang memerlukan aparatur dengan kapasitas yang memadai agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan secara efektif. Analisis penelitian menggunakan dimensi kapasitas individu menurut United Nations Development Programme (UNDP), yaitu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, etika pelayanan, dan kemampuan kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas individu aparatur BPBD Kota Gorontalo telah berjalan cukup baik berdasarkan dimensi United Nations Development Programme (UNDP), yaitu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, etika pelayanan, dan kemampuan kepemimpinan. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, simulasi kebencanaan, berbagi pengetahuan, keterlibatan langsung dalam penanganan bencana, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti kesempatan pelatihan yang belum merata, keterampilan teknis yang perlu terus ditingkatkan, serta penguatan komunikasi dan kepemimpinan dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat berlangsung lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Administrasi Publik; BPBD; Mitigasi Bencana; Pengembangan Kapasitas Individu; UNDP.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Kondisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar serta memiliki iklim tropis menyebabkan berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan letusan gunung berapi, berpotensi terjadi di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pengurangan risiko bencana menjadi penting untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian (Sidik, 2022). Bencana alam

dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Shalih & Nugroho, 2021). Oleh karena itu, mitigasi bencana diperlukan sebagai upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi melalui pencegahan, kesiapsiagaan, penyediaan informasi kebencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem peringatan dini, dan penyusunan rencana evakuasi (Idrus & Umar, 2024).

Kondisi tersebut relevan dengan Kota Gorontalo yang memiliki kerentanan cukup tinggi terhadap bencana, khususnya banjir. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir menjadi salah satu bencana yang dominan terjadi di Kota Gorontalo. Pada tahun 2024, banjir besar melanda puluhan kelurahan dan menyebabkan 4.686 rumah terendam serta 7.486 warga mengungsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko bencana di Kota Gorontalo masih cukup tinggi dan membutuhkan pelaksanaan mitigasi yang lebih optimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai peran strategis dalam melaksanakan dan mengoordinasikan berbagai kegiatan mitigasi bencana. Oleh karena itu, kapasitas aparatur BPBD menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan mitigasi bencana.

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan mitigasi bencana adalah kualitas sumber daya manusia. Aparatur pemerintah membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta sikap kerja yang memadai agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Kurniawan et al., 2023). Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Salah satu bentuk pengembangan kapasitas aparatur adalah melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Berdasarkan data BPBD Kota Gorontalo tahun 2022–2024, partisipasi aparatur BPBD dan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam berbagai pelatihan kebencanaan masih relatif terbatas dan cenderung fluktuatif. Pelatihan yang diberikan meliputi kaji cepat bencana, manajemen posko dan tanggap darurat, logistik dan distribusi bantuan, penyusunan dokumen rehabilitasi pascabencana, serta manajemen penanganan darurat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas aparatur belum sepenuhnya dilakukan secara merata, padahal aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, etika

pelayanan, dan kemampuan kepemimpinan yang memadai sangat dibutuhkan untuk melaksanakan mitigasi bencana secara efektif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penanggulangan dan mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD. Penelitian mengenai efektivitas kebijakan penanggulangan bencana lebih banyak menyoroti pelaksanaan mitigasi struktural dan nonstruktural, pembangunan infrastruktur, sosialisasi, serta koordinasi antarinstansi. Penelitian lainnya membahas faktor pendukung dan penghambat efektivitas mitigasi, penguatan kapasitas BPBD dalam kesiapsiagaan banjir, manajemen mitigasi bencana, serta efektivitas BPBD dalam penanggulangan prabencana. Hasil penelitian tersebut pada umumnya menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, kebijakan pemerintah, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Namun, penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji pengembangan kapasitas individu aparatur BPBD dalam pelaksanaan mitigasi bencana masih relatif terbatas.

Kesenjangan penelitian tersebut semakin terlihat karena kajian mengenai kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana umumnya masih ditempatkan dalam konteks efektivitas kebijakan, manajemen organisasi, atau kapasitas kelembagaan secara umum. Sementara itu, pengembangan kapasitas pada tingkat individu yang menguraikan kemampuan aparatur melalui aspek pengetahuan, keterampilan teknis, pengalaman, etika pelayanan, dan kemampuan kepemimpinan belum banyak dikaji secara khusus, terutama pada BPBD Kota Gorontalo. Padahal, kelima aspek tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan aparatur dalam memahami risiko bencana, melaksanakan tindakan teknis, belajar dari pengalaman penanganan bencana, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mengambil keputusan dan membangun koordinasi dalam pelaksanaan mitigasi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji pengembangan kapasitas individu aparatur BPBD Kota Gorontalo karena tingginya risiko bencana, khususnya banjir, perlu diimbangi dengan kualitas aparatur yang mampu menjalankan tugas penanggulangan bencana secara profesional, cepat, terkoordinasi, dan responsif. Penelitian ini menggunakan perspektif pengembangan kapasitas dari Merilee S. Grindle dan dimensi kapasitas individu menurut United Nations Development Programme (UNDP), yang dalam penelitian ini meliputi pengetahuan, keterampilan teknis, pengalaman, etika pelayanan, dan kemampuan kepemimpinan. Pendekatan tersebut menjadi pembeda penelitian karena tidak hanya melihat keberhasilan mitigasi dari sisi kebijakan atau kelembagaan, tetapi secara khusus menempatkan kapasitas individu aparatur sebagai fokus analisis. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan kapasitas

individu aparatur BPBD Kota Gorontalo dalam pelaksanaan mitigasi bencana, khususnya pada aspek pengetahuan, keterampilan, pengalaman, etika pelayanan, dan kemampuan kepemimpinan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kapasitas individu aparatur sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi BPBD Kota Gorontalo dalam memperkuat pengembangan kompetensi aparatur sehingga pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini disusun untuk memberikan dasar konseptual mengenai pengembangan kapasitas individu dalam mitigasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo didasarkan pada perspektif administrasi publik. Administrasi publik berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi kepentingan masyarakat melalui organisasi, manajemen, kebijakan, dan pelayanan publik. Dalam konteks penanggulangan bencana, administrasi publik memiliki peran penting karena pemerintah dituntut untuk menyusun kebijakan, mengelola sumber daya, membangun koordinasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Dimensi administrasi publik yang meliputi organisasi publik, manajemen publik, kebijakan publik, pelayanan publik, akuntabilitas dan etika publik, serta lingkungan administrasi publik menjadi landasan dalam melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan mitigasi bencana. Selain itu, Kajian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sebagai pembanding sekaligus penguat landasan penelitian.

Organisasi publik merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menjalankan kewenangan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, BPBD merupakan organisasi publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Keberhasilan organisasi publik dalam menjalankan tugasnya tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan dan prosedur kerja, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi. Oleh sebab itu, pengembangan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan pelayanan publik dan penanggulangan bencana. Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan kapasitas atau *capacity building*. Grindle menjelaskan bahwa *capacity building* merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan

individu maupun organisasi agar mampu menjalankan tugas dan mencapai tujuan secara efektif. Konsep tersebut menempatkan peningkatan kapasitas sebagai suatu proses yang tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mencakup kemampuan individu dalam melaksanakan tugas dan beradaptasi terhadap tuntutan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan kapasitas aparatur menjadi penting karena keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dan ketersediaan sarana prasarana, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas tersebut.

United Nations Development Programme (UNDP) membagi pengembangan kapasitas ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi individu, organisasi, dan sistem atau lingkungan. Dimensi individu berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bekerja dalam suatu lembaga, sedangkan dimensi organisasi berkaitan dengan struktur, prosedur, koordinasi, sarana prasarana, dan sistem manajemen. Sementara itu, dimensi sistem atau lingkungan berkaitan dengan kebijakan, regulasi, dukungan politik, kemitraan, dan jaringan kerja dengan masyarakat maupun lembaga lainnya. Penelitian ini memusatkan perhatian pada dimensi individu karena berhubungan secara langsung dengan kemampuan aparatur BPBD dalam menjalankan tugas mitigasi bencana.

Dimensi kapasitas individu dalam penelitian ini terdiri atas lima aspek. 1) Pengetahuan, yaitu kemampuan aparatur dalam memahami kebijakan, regulasi, prosedur, risiko, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Pengetahuan menjadi dasar bagi aparatur dalam memahami tugas dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi kebencanaan. 2) Keterampilan teknis, yaitu kemampuan aparatur dalam menerapkan pengetahuan ke dalam tindakan nyata, termasuk kemampuan melaksanakan tugas teknis dalam kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana. 3) Pengalaman, yaitu kemampuan yang terbentuk melalui keterlibatan aparatur dalam pelatihan, kegiatan mitigasi, maupun pengalaman menghadapi kondisi kebencanaan secara langsung. 4) etika pelayanan, yang berkaitan dengan sikap dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan mitigasi bencana, aparatur dituntut untuk memberikan pelayanan secara profesional, responsif, adil, jujur, dan bertanggung jawab. 5) Kemampuan kepemimpinan, yaitu kemampuan aparatur dalam mengarahkan, mengoordinasikan, membangun komunikasi, mengambil keputusan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Kelima aspek tersebut menjadi indikator yang digunakan untuk melihat pengembangan kapasitas individu aparatur BPBD Kota Gorontalo. Pengembangan kapasitas individu tersebut memiliki keterkaitan erat dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana

melalui tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan. Pelaksanaan mitigasi membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan untuk memahami risiko, merencanakan tindakan, melaksanakan kegiatan teknis, memberikan informasi kepada masyarakat, serta membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, semakin baik kapasitas individu aparatur, semakin besar kemampuan organisasi dalam mendukung pelaksanaan mitigasi bencana secara efektif.

Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penelitian ini. Khairina et al. (2024) meneliti efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah di Kota Makassar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana dilakukan melalui mitigasi struktural dan nonstruktural, pembangunan infrastruktur, sosialisasi, serta koordinasi antarlembaga. Penelitian tersebut memiliki persamaan karena sama-sama membahas penanggulangan dan mitigasi bencana oleh BPBD, tetapi memiliki perbedaan pada fokus penelitian karena lebih menekankan efektivitas kebijakan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan kapasitas individu aparatur.

Penelitian Febbyola Fitriwalni et al. (2022) mengenai faktor pendukung dan penghambat efektivitas kinerja BPBD Kabupaten Solok dalam mitigasi risiko bencana menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Penelitian tersebut memperkuat pentingnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Namun, penelitian tersebut tidak secara khusus menguraikan kapasitas individu aparatur berdasarkan lima aspek yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menempatkan pengembangan kapasitas individu sebagai aspek penting dalam mendukung efektivitas mitigasi bencana. Kerangka teoritis penelitian menghubungkan konsep *capacity building* dengan lima aspek kapasitas individu menurut UNDP, yaitu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, etika pelayanan, dan kemampuan kepemimpinan. Kelima aspek tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana BPBD Kota Gorontalo mengembangkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan mitigasi bencana serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses pengembangan kapasitas tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pengembangan kapasitas individu aparatur dalam pelaksanaan mitigasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo.

Penelitian dilaksanakan di BPBD Kota Gorontalo. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa BPBD merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk kegiatan mitigasi bencana. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, mulai dari proses pengumpulan data hingga analisis data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pengembangan kapasitas individu aparatur BPBD Kota Gorontalo.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dan catatan lapangan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas individu aparatur dalam mitigasi bencana. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti laporan kegiatan, arsip, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan mitigasi bencana di BPBD Kota Gorontalo. Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan terhadap permasalahan yang diteliti untuk memperoleh informasi secara mendalam. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen, laporan kegiatan, foto, dan arsip yang relevan (Anggito & Setiawan, 2018; Creswell, 2018; Sugiyono, 2016).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antarinformasi dapat dipahami secara sistematis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab fokus penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data dan memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (Patton, 2022). Model penelitian yang digunakan berangkat dari teori pengembangan kapasitas (*capacity building*) dengan fokus pada dimensi kapasitas individu menurut United Nations Development Programme (UNDP). Analisis

diarahkan pada lima aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan teknis, pengalaman, etika pelayanan, dan kemampuan kepemimpinan. Kelima aspek tersebut digunakan untuk menggambarkan pengembangan kapasitas aparatur BPBD Kota Gorontalo dalam mendukung pelaksanaan mitigasi bencana yang lebih efektif, terkoordinasi, dan responsif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai pengembangan kapasitas individu dalam mitigasi bencana dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis. Berdasarkan teori United Nations Development Programme (UNDP), pengembangan kapasitas individu dalam penelitian ini dianalisis melalui lima aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan teknis, pengalaman, etika pelayanan, dan kemampuan kepemimpinan. Kelima aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung kemampuan aparatur melaksanakan tugas mitigasi bencana.

Pengembangan Kapasitas pada Aspek Pengetahuan

Pengetahuan merupakan kemampuan individu dalam memahami informasi, konsep, serta prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks pengembangan kapasitas, pengetahuan menjadi dasar utama bagi aparatur dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif dan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pengetahuan aparatur BPBD Kota Gorontalo telah dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, simulasi kebencanaan, serta kegiatan *knowledge sharing* bagi pegawai yang telah mengikuti pelatihan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai kebijakan, regulasi, prosedur, dan pelaksanaan mitigasi bencana. Dengan adanya penyampaian informasi mengenai kebijakan atau aturan baru melalui rapat, aparatur memiliki kesempatan untuk menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan menjadi dasar penting bagi aparatur dalam melaksanakan mitigasi bencana. Aparatur tidak hanya dituntut mengetahui aturan, tetapi juga memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini sesuai dengan perspektif UNDP yang menempatkan pengetahuan sebagai salah satu unsur utama kapasitas individu. Pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur memungkinkan aparatur melaksanakan kegiatan secara lebih terarah dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya. Meskipun demikian, pengembangan pengetahuan belum sepenuhnya merata. Data dalam penelitian menunjukkan bahwa kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan masih terbatas

karena adanya keterbatasan kuota. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kompetensi yang sama. Dengan demikian, BPBD perlu memperluas kesempatan pelatihan dan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan secara internal agar pengetahuan yang diperoleh aparatur yang mengikuti pelatihan dapat ditransfer kepada pegawai lainnya.

Pengembangan Kapasitas pada Aspek Keterampilan

Keterampilan merupakan kemampuan teknis individu dalam melaksanakan tugas tertentu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan teknis aparatur dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan kaji cepat bencana, simulasi, latihan evakuasi, penanganan logistik, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada aparatur untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi yang lebih nyata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, tetapi perlu dilanjutkan dengan kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan. Keterampilan teknis menjadi penting karena kegiatan mitigasi bencana membutuhkan kemampuan praktis, ketepatan tindakan, dan kesiapan aparatur dalam menghadapi kondisi di lapangan.

Namun, pengembangan keterampilan teknis masih menghadapi kendala berupa belum meratanya kesempatan aparatur mengikuti pelatihan. Akibatnya, terdapat perbedaan kemampuan teknis antarpegawai. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelatihan yang dilakukan BPBD telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterampilan, tetapi perlu dilakukan secara lebih merata dan berkelanjutan agar kemampuan teknis tidak hanya dimiliki oleh aparatur tertentu.

Pengembangan Kapasitas pada Aspek Pengalaman

Pengalaman memberikan kesempatan bagi aparatur untuk memahami situasi kerja secara nyata, mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan, serta meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman aparatur diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan kebencanaan, simulasi, pelatihan, serta pendampingan dari aparatur yang lebih berpengalaman. Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran praktis bagi aparatur dalam menghadapi kondisi bencana. Salah satu informan dari Tim Reaksi Cepat menjelaskan bahwa semakin sering terlibat dalam kegiatan lapangan, semakin banyak pengalaman yang diperoleh dan pengalaman tersebut membantu dalam menentukan tindakan ketika menghadapi situasi

bencana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan aparatur. Pengalaman lapangan membantu aparatur memahami karakteristik situasi bencana, meningkatkan kepercayaan diri, serta membantu menentukan tindakan secara lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, pengalaman menjadi bagian dari proses pembelajaran yang melengkapi pengetahuan dan keterampilan teknis. Namun, tingkat pengalaman aparatur masih berbeda-beda karena dipengaruhi oleh masa kerja dan intensitas keterlibatan dalam kegiatan kebencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua aparatur memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengalaman langsung. Oleh karena itu, pengembangan pengalaman dapat dilakukan melalui peningkatan keterlibatan aparatur dalam simulasi, kegiatan lapangan, pendampingan, dan pembelajaran dari aparatur yang lebih berpengalaman.

Dengan demikian, pengalaman dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai lamanya seseorang bekerja, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang diperoleh melalui keterlibatan dalam kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana. Semakin sering aparatur terlibat dalam kegiatan tersebut, semakin besar kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi kebencanaan.

Pengembangan Kapasitas pada Aspek Etika Pelayanan

Etika pelayanan merupakan nilai, sikap, dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur BPBD Kota Gorontalo telah berupaya menerapkan etika pelayanan dalam pelaksanaan tugas dengan mengutamakan sikap profesional, jujur, adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap masyarakat. Pelayanan juga diberikan tanpa membedakan masyarakat dalam memperoleh bantuan. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian aparatur terhadap kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Etika pelayanan merupakan bagian penting dari kapasitas individu karena aparatur tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Viranti et al. (2025) dan Febbyola Fitriwalni et al. (2022) yang menunjukkan pentingnya kualitas aparatur dalam mendukung keberhasilan penanggulangan dan mitigasi bencana. Berdasarkan temuan tersebut, etika pelayanan aparatur BPBD Kota Gorontalo telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan mitigasi bencana. Namun, nilai profesionalisme, kejujuran, keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Penguatan etika pelayanan penting untuk menjaga

kepercayaan masyarakat dan memastikan pelayanan kebencanaan dapat diberikan secara optimal.

Pengembangan Kapasitas pada Aspek Kemampuan Kepemimpinan

Kemampuan kepemimpinan merupakan kemampuan individu dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kepemimpinan di BPBD Kota Gorontalo telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari kemampuan pimpinan dalam memberikan arahan kepada pegawai, membangun komunikasi, memberikan motivasi, mengambil keputusan ketika menghadapi keterbatasan sumber daya, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat. Kemampuan tersebut membantu kegiatan mitigasi berjalan secara lebih terarah dan terkoordinasi.

Dalam perspektif UNDP, kemampuan kepemimpinan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan kapasitas individu. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan, tetapi juga kemampuan mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, dan mengoordinasikan berbagai sumber daya. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Febbyola Fitriwalni et al. (2022) yang menunjukkan bahwa koordinasi dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan mitigasi bencana.

Dengan demikian, kemampuan kepemimpinan aparatur BPBD Kota Gorontalo telah mendukung pelaksanaan mitigasi bencana. Meskipun demikian, peningkatan kompetensi kepemimpinan tetap diperlukan, terutama dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, komunikasi, pengambilan keputusan, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Penguatan aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan mitigasi bencana di Kota Gorontalo.

Implikasi Hasil Penelitian

Secara teori, Pengembangan kapasitas individu aparatur BPBD Kota Gorontalo menunjukkan hasil yang cukup baik. BPBD telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan dan pelatihan, simulasi kebencanaan, keterlibatan langsung dalam kegiatan mitigasi, pembinaan aparatur, serta penguatan koordinasi dengan berbagai instansi. Kelima aspek kapasitas individu memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pengetahuan menjadi dasar bagi aparatur dalam memahami kebijakan dan risiko bencana, kemudian diterapkan melalui keterampilan teknis. Keterampilan tersebut berkembang melalui pengalaman, sedangkan etika pelayanan memastikan kemampuan tersebut digunakan dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Selanjutnya, kemampuan kepemimpinan mendukung koordinasi dan pengarahan berbagai sumber daya dalam pelaksanaan mitigasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan kapasitas individu dalam mitigasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa kapasitas individu aparatur secara umum telah mendukung pelaksanaan mitigasi bencana. Hal tersebut terlihat dari adanya pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi kebencanaan, peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan simulasi, bertambahnya pengalaman melalui keterlibatan dalam kegiatan kebencanaan, penerapan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan kepemimpinan dalam memberikan arahan, mengambil keputusan, membangun komunikasi, dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Kelima aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas mitigasi bencana. Meskipun demikian, pengembangan kapasitas individu aparatur belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat keterbatasan dalam kesempatan mengikuti pelatihan yang menyebabkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan belum merata, serta adanya perbedaan pengalaman antaraparatur. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kemampuan setiap aparatur dapat berkembang secara lebih merata dan mampu mendukung pelaksanaan mitigasi bencana secara efektif, profesional, dan responsif.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan, BPBD Kota Gorontalo disarankan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Pelatihan tidak hanya perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas masing-masing aparatur agar peningkatan kapasitas dapat dirasakan secara lebih merata. BPBD Kota Gorontalo juga disarankan untuk memperbanyak kegiatan simulasi dan keterlibatan aparatur dalam kegiatan lapangan agar pengalaman dan kesiapan dalam menghadapi bencana dapat terus meningkat. Aparatur yang memiliki pengalaman lebih banyak dapat dilibatkan dalam kegiatan berbagi pengetahuan dan pendampingan kepada aparatur lainnya sehingga terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman di dalam organisasi. Selain itu, pembinaan terhadap etika pelayanan dan kemampuan kepemimpinan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk memperkuat sikap profesional, tanggung jawab, komunikasi, koordinasi, serta kemampuan pengambilan keputusan aparatur dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Dengan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan dan merata, kapasitas individu aparatur

diharapkan semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan mitigasi bencana di Kota Gorontalo.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Y., et al. (2025). Pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui kompetensi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*. <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/344/pengembangan-sumber-daya-manusia-aparatur-melalui-kompetensi.html>
- Asrul, A. (2025). Pengaruh alih fungsi lahan terhadap kejadian banjir di Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 9(1), 52–61. <https://doi.org/10.29408/geodika.v9i1.29256>
- Bria, J. K., Kase, P., & Rene, M. O. (2025). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Malaka pada tahun 2024. *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 3(1), 139–156. <https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i1.238>
- Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu* (Edisi ke-3). Gava Media. <https://kubuku.id/detail/enam-dimensi-strategis-administrasi-publik--konsep--teori-dan-isu--edisi-3-/15611>
- Kurniawan, H., W., & Suprojo, A. (2023). Implementasi kebijakan dalam pengembangan sumber daya. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 215–220. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/download/8222/3201>
- Fitriani, I. D., Zulkarnaen, W., & Bagianto, A. (2021). Analisis manajemen mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap bencana alam erupsi Gunung Tangkuban Parahu. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(1), 91–111. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/689>
- Idrus, I., & Umar, B. (2024). Mitigasi bencana banjir akibat longsor pada daerah aliran sungai terhadap ketersediaan air bersih di Kecamatan Dondo. *Jurnal Bangunan Konstruksi (BARAKKA)*, 2(1), 46–52. <https://doi.org/10.63877/jbk.v2i1.47>
- Khairina, S. H., Hans, A., & Arif, I. A. (2024). Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dalam konteks pembangunan daerah: Studi kasus Kota Makassar. *Development Policy and Management*.
- Mulyani, S., Katili, M. R., & Yusuf, R. (2021). Sistem informasi mitigasi bencana banjir berbasis. *1*(2), 150–161.
- Muslim, S., Isa, R., & Nani, Y. N. (2026). The influence of work culture and civil servant discipline on improving performance at the Gorontalo City Finance Agency Office. *7*.
- N, F. F., Alhadi, Z., & Publik, A. (2022). Faktor pendukung dan penghambat efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok dalam melakukan mitigasi risiko bencana letusan Gunung Api Talang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 16594–16602. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/5211>
- Henry, N. (n.d.). *Public administration and public affairs*. Routledge (Taylor & Francis Group). <https://www.overdrive.com/media/4037624/public-administration-and-public-affairs>

- Patton, M. Q. (2022). Impact-driven qualitative research and evaluation. In *The SAGE handbook of qualitative research design* (Vol. 2, pp. 1165–1180).
- Radjak, D., Tohopi, R., & Nani, Y. N. (2025). Transparansi pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. 2(November).
- Saleh, A. J. S., Tanipu, F., & Harold, R. (2025). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Gorontalo. 3(1), 63–72.
- Shalih, O., & Nugroho, R. (2021). Reformulasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. *Cakrawala*, 15(28), 124–138. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.379>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tohopi, R. (2021). Model perumusan kebijakan “Public Approach” perencanaan pembangunan. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 141–154. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3916>
- Viranti, R., Aprillia, B., Septiansyah, B., & Pemerintahan, P. I. (2025). Penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kecamatan Kalibunder. 02(03).
- Wijaya, W., & A. L. (2025). Manajemen penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi: Studi pada BPBD. *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), 138–149. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/en/index>